

**AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH
MINDERJARIG
(STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

SAHTANTA EKA PRANANTA TARIGAN
NPM. 0671110121

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH
MINDERJARIG
(STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda)**

Disusun Oleh :

Sahtanta Eka Prananta Tarigan
NPM. 0671110121

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

P.Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH
MINDERJARIG
(STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda)**

Disusun Oleh :

Sahtanta Eka Prananta Tarigan
NPM. 0671110121

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 3 Desember 2010**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

- | | |
|---|---------|
| 1. <u>Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.</u>
NIP. 19620625 199103 1 001 | (.....) |
| 2. <u>H. Sutrisno, S.H., M.Hum.</u>
NIP. 19601212 198803 1 001 | (.....) |
| 3. <u>Subani, S.H., M.Si.</u>
NIP. 19510504 198303 1 001 | (.....) |

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH
MINDERJARIG
(STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda)**

Disusun Oleh :

Sahtanta Eka Prananta Tarigan
NPM. 0671110121

**Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
2. H. Sutrisno, S.H., M.Hum (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
3. Subani S.H., M.Si (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

Motto :

Hidup ini indah,

manfaatkan hidupmu sebaik-baiknya dengan bahagia,

dan tanpa kesedihan,

tetap tersenyum dan

nikmatilah hidupmu dengan bebas dan tanpa beban.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahtanta Eka Prananta Tarigan
Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 9 November 1987
NPM : 0671110121
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jln. Tenggilis Mejoyo blok AG-15, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH MINDERJARIG (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mengetahui
KETUA PROGRAM STUDI

Surabaya, 3 Desember 2010
Penulis,

Subani, S.H, M.si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Sahtanta Eka Prananta Tarigan
NPM. 0671110121

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran TUHAN Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH MINDERJARIG (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda).

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H, M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim, yang telah memberi kesempatan mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim.
2. Bapak Sutrisno, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan selama penyusunan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim Dan telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penyusun dengan meluangkan tenaga dan waktunya.
3. Bapak Subani, S.H, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak P.Handoko, S.H, S.Sos, M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang meluruskan kesalahan-kesalahan penyusun.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, yang dengan sabar memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional yang telah membantu urusan administrasi dalam pelaksanaan.
7. Untuk Bapak, Ibu dan ke 3 Kakak tercinta Mbak Silvy, Mbak Susan, Mbak Trias, yang telah dengan sabar memberikan dorongan baik moril maupun materiil untuk selesainya skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2006 khususnya Aseptya Nur Ahmad dan Ruben Arista Prabowo selaku anggota Himaho, serta semua teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan motivasi serta doa yang tulus kepada penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini serta membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penyusun diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Desember 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI ...	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2. Manfaat Praktis	4
1.5. Kajian Pustaka	4
1.5.1. Definisi-definisi	5
1.5.2. Syarat Perkawinan.....	7

1.5.3. Definisi Perceraian	9
1.5.4. Alasan-alasan Perceraian	10
1.5.5. Tindakan-tindakan Sementara Pengadilan Untuk Kepentingan Istri dan Anak-anaknya	12
1.5.6. Akibat-akibat Perceraian	13
1.6. Metode Penelitian	18
1.6.1. Pendekatan Masalah	18
1.6.2. Sumber Bahan Hukum	19
1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
1.6.5. Sistematika Penulisan	20

**BAB II TANGGUNG JAWAB DAN SANGSI HAK ASUH ANAK
YANG MASIH MINDERJARIG PADA ORANG TUA
SETELAH PENETAPAN PUTUSAN PERCERAIAN 22**

2.1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Masih <i>Minderjarig</i>	23
2.2. Sanksi Hak Asuh Anak Yang Masih <i>Minderjarig</i> Pada Orang Tua	26
2.3. Akibat Hukum Dari Perceraian Bagi Anak Yang Masih <i>Minderjarig</i>	27
2.4. Hak Menemui Anak-anak (<i>Droit de Visite</i>)	31

**BAB III PENERAPAN ATAU PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR :**

83/PDT.G/2005/PN.SDA. TERKAIT DARI	
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN	
PENGADILAN PADA PEMBERIAN HAK ASUH ANAK	
YANG MASIH MINDERJARIG.....	33
3.1. Keputusan Hakim dalam Memberikan Hak Asuh Anak.....	34
3.2. Dasar-dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan	
Putusan Perceraian.....	54

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Data Statistik Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Sidoarjo 2

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Sahtanta Eka Prananta Tarigan
NIM : 0671110121
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 9 November 1987
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH
MINDERJARIG
(STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari sebuah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode induksi, yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal khusus. Hal-hal yang bersifat umum maksudnya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta penerapannya dalam praktik yang dirangkum menjadi kesimpulan dalam skripsi. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis, ilmiah, dan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal perceraian ini menimbulkan akibat hukum yang begitu rumit, yaitu mengenai hak asuh anak yang *minderjarig*, harta gono-gini atau harta bersama, warisan dan lain-lain. Seperti dalam contoh kasus perceraian antara Desi Firdaningsih selaku Penggugat dengan surya atmadja selaku Tergugat, Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak bisa rukun lagi dan tidak mungkin disatukan lagi, alasan inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara perceraian,

Berkaitan dengan hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Dewa Risky Atmadja, Gusti Rizky Atmadja dan Shalsa Dewi Afianda. Mengenai siapa yang berhak menjadi wali dari ketiga anaknya merupakan kewenangan Majelis Hakim sepenuhnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan keterangan dari saksi-saksi.

Kata kunci : Perceraian, hak asuh anak, pertimbangan hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika sepanjang pernikahannya kedua orang tua sudah tidak sepaham atau sering terjadi perselisihan dan sudah tidak bisa disatukan lagi, maka jalan terakhir yang bisa diambil adalah perceraian.

Dalam suatu perceraian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu banyak dan rumit, baik itu mengenai hak asuh anak yang masih *minderjarig*, warisan, pembagian harta gono-gini dan sebagainya, tetapi dalam skripsi ini, penulis lebih menyoroti tentang hak asuh anak yang masih *minderjarig*, yang dimaksud *minderjarig* itu sendiri adalah anak-anak yang masih kecil atau dibawah umur¹, karena anak merupakan masa depan bangsa.

Anak juga merupakan korban dari perceraian kedua orangtuanya, karena anak merupakan orang yang paling merasakan langsung dampak dari perceraian tersebut, karena anak mempunyai ikatan batin terhadap ayah dan ibunya. Selain keluarga, anak juga salah satu orang yang tidak menginginkan adanya perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Seringkali orang tua yang ingin bercerai tidak memikirkan perasaan anaknya, mereka hanya memikirkan

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu-Semarang, 1997, h. 592.

ego mereka masing-masing. Orang tua tidak berpikir bahwa anak juga mempunyai perasaan tidak ingin kalau mempunyai orang tua yang tidak bersatu lagi, meskipun dengan keadaan yang demikian orang tua berjanji bahwa dengan adanya perceraian ini tidak mengurangi rasa sayang orang tua pada anaknya, mereka berjanji akan mengurus anaknya dengan baik, menyayangi dan memenuhi kebutuhannya meskipun orang tua telah bercerai.

Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan istri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa kedua orang tuanya tidak bersama lagi dalam suatu rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang tercurah pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu. Secara materiil ialah Diberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari kedua orang tuanya.

Angka perceraian pada masa sekarang ini begitu meningkat, khususnya di daerah Sidoarjo, hal ini dibuktikan dengan seringnya Pengadilan Negeri Sidoarjo menggelar persidangan mengenai perceraian, berikut ini adalah data perceraian di Pengadilan Negeri Sidoarjo :

Tabel 1. Data Statistik Kasus perceraian di Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 2008 dan 2009

Tahun	Gugatan yang masuk	Yang sudah diputus	Banding
2008	69 kasus	69 kasus	0 kasus
2009	97 kasus	97 kasus	1 kasus

* Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo

Dari data statistik kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tahun 2008 banyaknya permohonan gugatan perceraian yang masuk mencapai 69 kasus, pada tahun 2009 meningkat mencapai 97 kasus, jika diperhatikan lebih lanjut dapat diambil kesimpulan bahwa makin banyaknya anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan selayaknya anak-anak yang seumuran mereka yang bisa mendapatkan kasih sayang yang tulus dari kedua orang tuanya.

1.2. Rumusan Masalah

Perceraian merupakan berpisahnya suami dan istri untuk tidak hidup bersama lagi karena sebuah alasan tertentu, dengan resmi bercerainya seorang suami dan istri maka akan menimbulkan akibat hukum yang lain yaitu mengenai hak asuh anaknya, warisan, pembagian harta gono gini dan sebagainya.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan:

- a. Apa saja tanggung jawab dan sangsi hak asuh anak yang masih *minderjarig* pada orang tua setelah penetapan putusan perceraian?
- b. Bagaimana penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda. terkait dari pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan pada pemberian hak asuh anak yang masih *minderjarig*?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tanggung jawab dan sangsi hak asuh anak yang masih *minderjarig* pada orang tua setelah penetapan putusan perceraian.

- b. Untuk menganalisis penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda. terkait dari pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan pada pemberian hak asuh anak yang masih *minderjarig*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Teoritis

- a. Diharapkan dapat membandingkan dan mengkomparasikan antara teori dengan praktek.
- b. Penulis dapat mengetahui tentang akibat hukum dari perceraian terhadap hak asuh anak dibawah umur.

1.4.2. Bagi Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada orang tua yang telah bercerai tentang pentingnya hak seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.
- b. Memberikan kontribusi sumbangan khususnya dalam kesadaran hukum dan menambah wawasan kepada masyarakat untuk mengerti bahwa akibat dari perceraian sangat merugikan sekali khususnya untuk perkembangan anak kandungnya.

1.5. Kajian Pustaka

Judul dari proposal skripsi ini adalah Akibat hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan perceraian terhadap hak asuh anak yang masih *minderjarig* (Study kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :

83/Pdt.G/2005/PN.Sda), agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang judul yang dimaksud, kiranya perlu dijelaskan mengenai maksud dari judul proposal skripsi ini.

1.5.1. Definisi-definisi

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU. Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat.

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita, jenis kelamin ini adalah kodrat karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.

suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula ada fungsi sebagai suami istri.²

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam undang – undang.⁴

² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti-Bandung, 2000, h.135.

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.XXVI, Jakarta-Internusa, 1994, h.42.

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta-Rineka Cipta, 2004, h. 156.

Perwalian, adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.⁵

Masalah mengenai Perwalian ini, bagi Warga Negara Indonesia Asli berlaku hukum adatnya masing – masing seperti yang telah diatur dalam Stb.tahun 1931 Nomor.53. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Cina dan Keturunan Eropa, telah berlaku ketentuan Perwalian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.⁶

Anak yang berada di bawah perwalian, adalah:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan (*naturlijk kind*).⁷

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak :

- a. Pasal 1 Ketentuan umum

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2). Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- 3). Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

⁵ Arif Masdoeki dan M.H TirtaHamidjaja, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta-Akademika Persindo, 1963, h. 156.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta-Rineka Cipta, 2005, h. 205.

⁷ Soebekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta-PT Intermedia, 2003, h. 52.

- b. Pasal 14 menyatakan bahwa :

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

1.5.2. Syarat Perkawinan

Hukum perkawinan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Hukum perkawinan yang bertalian dengan hubungan antara pria dan wanita untuk menciptakan keluarga.
- b. Hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang harta suami istri yang timbul dalam suatu hubungan perkawinan.⁸

Syarat perkawinan adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 27-49 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPer), serta terbagi dalam syarat-syarat :

- a. Syarat Materiil Mutlak

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini berlaku umum, jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak

⁸ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet.I, Jakarta-Gitama Jaya, 2005, h. 26.

dapat dilangsungkan. Dalam hal yang demikian dapat dikatakan, bahwa ada rintangan perkawinan yang mutlak.

Syarat tersebut ada 5 macam, yaitu :⁹

- 1). Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain (Pasal 27 KUHPer).

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”.

- 2). Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak (Pasal 28 KUHPer)

“Azas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-isteri”.

- 3). Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 29 KUHPer)

“Seorang jejak yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.

- 4). Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan yang terakhir (Pasal 34 KUHPer).

- 5). Harus ada izin pihak ketiga (Pasal 35 KUHPer)

“Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka. Jika hanya satu saja diantara mereka memberikan izinnya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan-orang tuannya atau perwalian atas diri si anak, maka Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya, anak itu mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan anak, berkuasa memberikan izin untuk kawin, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinnya diperlukan dan akan para keluarga sedarah atau semenda. Jika satu diantara kedua orang tua telah meninggal dunia, atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang lain”.

⁹ R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*-Surabaya-Airlangga University Press, 2000. h. 19.

b. Syarat Materiil Relatif

Ialah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak dapat melangsungkan perkawinan, namun kendati demikian ia tidak boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang dikawininya.¹⁰

1.5.3. Definisi Perceraian

Suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil¹¹, disini yang dimaksud adalah perceraian yang dilakukan oleh suami atau istri yang beragama non muslim.

Menurut ketentuan Pasal 199 KUHPer, perkawinan dapat bubar oleh sebab :¹²

- a. Kematian, yaitu suami atau isteri meninggal dunia. Apabila suami atau isteri meninggal dunia, maka perkawinan dianggap tidak ada lagi, sedangkan mengenai bubaranya perkawinan karena alasan kematian, undang-undang tidak menyebutkan ketentuan apapun.
- b. Ketidakhadiran ditempat oleh salah satu pihak selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami atau isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 199 Jo. Pasal 493-495 KUHPer. Bubaranya perkawinan karena butir kedua ini, ada akibat adanya dugaan bahwa seseorang yang tidak hadir selama waktu tertentu dianggap meninggal dunia. Oleh karena itu, suami atau isteri yang ditinggalkan, dapat kawin lagi dengan orang lain dengan izin hakim. Perlu diperhatikan disini bahwa perkawinan yang terdahulu dinyatakan bubar dengan dilangsungkannya perkawinan yang baru.

¹⁰ *Ibid*, h. 24.

¹¹ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op.cit.*, h. 135.

¹² R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.cit.*, h. 133-134.

Suatu izin hakim untuk melangsungkan perkawinan baru belum cukup membubarkan perkawinan yang terdahulu. Perkawinan itu baru dianggap bubar jika putusan hakim telah dibukukan dalam daftar catatan sipil dan diikuti dengan adanya suatu perkawinan baru dengan orang lain.

- c. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil (Pasal 199 Jo. Pasal 200-206 KUHPer), dan Perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab 10 Pasal 207-232a BW. Dalam hal-hal seperti ini, maka perkawinan bubar oleh karena putusan hakim yang telah didaftarkan dalam daftar catatan sipil.

1.5.4. Alasan-alasan Perceraian

Menurut Pasal 209 KUHPer menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas :

- a. Zinah atau *overspel*
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat..
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Overspel atau zinah Menurut Pitlo ada 3 kemungkinan yaitu :¹³

- a. Setiap pihak dapat mengajukan gugat cerai
- b. Jika hal tersebut disebabkan oleh bujukan dan memudahkan atau membiarkan, alasan pengajuan gugatan menjadi gugur.
- c. Gugat cerai dapat diajukan oleh kedua belah pihak dengan kata lain para pihak dapat mengajukan gugat kembali.

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan seperti tersebut di atas. Maksud pembentuk undang-undang yang sebenarnya, ialah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta-fakta seperti tersebut di atas benar-benar terjadi. Sebagai contoh, jika isteri menggugat perceraian terhadap suami karena

¹³ *Ibid*, h. 137.

melakukan *overspel*, maka isteri harus membuktikan fakta atau peristiwa itu. Demikian halnya jika suami mengakui atau tidak menyangkal bahwa ia telah melakukan *overspel*.

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat PP No 9 Tahun 1975) Pasal 19 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

1.5.5. Tindakan-tindakan Sementara Pengadilan Untuk Kepentingan Isteri dan Anak-anaknya.

Pengadilan dapat mengeluarkan beberapa ketetapan atau mengambil tindakan-tindakan sementara selama masih dalam proses. Ketetapan-ketetapan sementara adalah sama atau mirip dengan semua ketetapan sementara yang dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan surat ketetapan pemberian izin untuk mengajukan gugat cerai. Ketetapan tersebut, adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Pengadilan dapat memberi izin kepada isteri, baik selaku penggugat maupun selaku penggugat untuk meninggalkan rumah suaminya selama perkara masih dalam proses. Pengadilan akan menunjuk rumah tempat isteri diwajibkan bertempat tinggal.

Pasal 212 KUHPer menentukan bahwa dengan izin pengadilan isteri dapat meninggalkan rumah suaminya. Menurut kata-kata dalam pasal tersebut, maka pengadilan tidak boleh menetapkan bahwa isteri dapat terus tinggal dirumah bersama suami ataupun suami harus meninggalkan rumah istri.

Tentang penunjukkan rumah isteri oleh Ketua Pengadilan, kalimat dalam Pasal 835 KUHPer tidak begitu tegas, namun demikian telah jelas bahwa undang-undang tidak bermaksud agar Ketua Pengadilan dapat mewajibkan suami meninggalkan rumah bersama sehingga isteri dapat terus bertempat tinggal di rumah itu.

- b. Pengadilan Negeri dapat menetapkan bahwa selama perkara dalam proses suami harus membayar tunjangan hidup bagi isteri dan anak-anaknya yang mengikuti isteri. Pasal 213 ayat (1) KUHPer.
- c. Pasal 214 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa selama perkara dalam proses pengadilan untuk sementara dapat menghentikan pelaksanaan kekuasaan orang tua untuk seluruhnya atas bagian serta memberikan hak-hak yang dianggap perlu atas diri dan barang-barang anak-anaknya kepada orang tua yang lain atau kepada pihak ketiga atau kepada Dewan Perwalian.

¹⁴ *Ibid*, h. 143-144

Pasal 24 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat atau tergugat, pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

1.5.6. Akibat-akibat Perceraian

- a. Terhadap Istri

Pembubaran yang dikarenakan perceraian, maka segala akibat perkawinan seperti hak-hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus terhitung sejak bubaranya perkawinan tersebut.

Istri memperoleh kembali kedudukannya sebagai wanita yang tidak kawin dan kekuasaan sebagai orang tua menjadi terhenti. Akan tetapi terhentinya itu tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu baru dianggap ada sejak keputusan perceraian didaftarkan. Hal itu perlu diketahui bahwa dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian oleh karena perkawinan.

b. Terhadap Harta Kekayaan

1). Kebersamaan harta kekayaan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisahan dan pembagian kecuali bila istri melepaskan haknya atas kebersamaan tersebut. Bubarnya harta kebersamaan harta terjadi sejak saat putusan perceraian didaftarkan pada catatan sipil.

2). Keuntungan-keuntungan yang dijanjikan pada perjanjian kawin.

Semua tunjangan yang telah dijanjikan oleh pihak ketiga tetap berlaku dan harus dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut kepada suami dan atau istri selaku pihak yang dijanjikan tunjangan-tunjangan tersebut, dan perceraian bukanlah urusan pihak ketiga sehingga pihak ketiga tidak seharusnya memperoleh keuntungan pada perceraian itu. Perkecualian itu terjadi jika telah terdapat perjanjian bahwa semua tunjangan atau keuntungan lain akan batal jika terjadi perceraian sehingga jika perceraian terjadi, maka semua tunjangan tersebut tidak harus dipenuhi.

3). Kewajiban untuk memberikan alimentasi

Pasal 225 KUHPer kurang lebih menyatakan bagi pihak yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai penghidupannya, sementara perkawinan dibubarkan karena perceraian maka pengadilan dapat memerintahkan pihak yang lain untuk memberikan alimentasi kepada penggugat. Hakim memang

berwenang memerintahkan pemberian alimentasi, tetapi tidak wajib mengabulkan tuntutan pemberian alimentasi.

c. Anak-anak yang masih *minderjarig*

1). Perwalian

Dengan bubarnya perkawinan maka berakhir pula kekuasaan orang tua untuk digantikan dengan perwalian. Pasal 229 ayat (1) KUHPer menentukan bahwa setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orangtua serta sanak keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang masih *minderjarig* dan putusan cerai pun sudah dijatuhkan, maka pengadilan kemudian memutuskan masalah yang berkaitan dengan siapa dengan orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anaknya melalui gugatan apakah mereka masih mempunyai kuasa orang tua jika kekuasaan orang tua sudah dihentikan atau dibebaskan atau dicabut, maka ia tidak dapat menjadi wali. Masalah perwalian tersebut diserahkan kepada hakim untuk menentukan pihak wali yang layak bagi anak-anak tersebut. Dalam rangka penunjukan tersebut, kepentingan si anak harus diperhatikan karena anak yang masih kecil selalu membutuhkan ibunya. Oleh karena itu, pada umumnya si ibu akan diangkat sebagai wali. Akan tidak berarti bahwa ibu selalu diangkat sebagai wali jika kelakuan ibu buruk sekali, maka demi kepentingan sang anak, sang ayah akan diangkat sebagai walinya. Dalam pengangkatan wali, hakim

tidak terikat pada ketentuan-ketentuan hukum pembuktian dan hakimpun tidak wajib mendengar keterangan para saksi.

Wali diangkat dengan surat ketetapan, dan bukan dengan keputusan, oleh karena pengangkatan wali tidak dianggap sebagai perkara, dan dalam hal ini hakim tidak wajib memberikan alasan-alasan tentang ketetapan itu.

2). Hubungan ayah-ibu dengan anak-anaknya

Hubungan antara suami dengan istri bubar karena adanya pembubaran perkawinan, akan tetapi hubungan antara arang tua dengan anak masih tetap berlangsung.

Dengan bubarnya perkawinan anak-anak tidak akan kehilangan keuntungan yang diberikan kepadanya baik oleh Undang-undang ataupun oleh perjanjian perkawinan orang tuanya hal ini diatur dalam pasal 231 KUHPer.

Terdapat kekhawatiran bahwa ayah atau ibu yang tidak dijadikan wali tidak akan memberikan alimentasi secukupnya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang minderjarig, maka Pengadilan Negeri akan membuat ketetapan mengenai jumlah (di Indonesia biasanya untuk setiap bulan) yang harus dibayarkan oleh ayah atau ibu kepada Dewan Perwalian untuk keperluan tersebut (pasal 230b KUHPer).

3). Hak menemui anak-anak

Hak untuk menemui anak semula memang tidak diakui oleh karena pihak yang ditunjuk sebagai wali memerlukan kebebasan untuk mendidik anak-anaknya, sehingga dialah (wali) yang menentukan, apakah penting bagi si anak jika dia akan bertemu dengan pihak lain. Jadi hal ini semata-mata untuk kepentingan si anak itu sendiri.

Apabila orang tua yang ditunjuk tanpa alasan menolak pertemuan antara anak dengan orang tua yang tidak ditunjuk sebagai wali, maka hal ini dapat mengakibatkan perubahan wali.

Di sisi lain anak juga memiliki hak untuk bersama (unifikasi) dengan keluarganya. Anak juga memiliki hak privat untuk bisa bermain, berhati nurani, memperoleh informasi, serta hak untuk mengakses informasi. Termasuk tentang proses hukum perceraian kedua orang tuanya di Pengadilan. Jadi anak memiliki hak untuk berpendapat. Ini penting, mengingat ke depannya akan mempengaruhi pola perkembangan serta pandangan anak terhadap apa yang tengah terjadi pada kedua orang tuanya.¹⁵

Menurut Pasal 41 UU. Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

¹⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* , Yogyakarta-Pustaka Yustisia, 2007, h. 117.

anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya

- b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Masalah kewajiban orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian diatur dalam Pasal 45 UU. Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam proposal skripsi ini sesuai judul yang diajukan maka skripsi yang akan di angkat nantinya menggunakan

metode yuridis normatif, artinya penulisan skripsi menitik beratkan pada analisa peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku serta bersifat mengikat untuk dipergunakan sebagai dasar menjawab semua yang dibahas.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penelitian diperlukan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer berupa bahan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda.
- b. Bahan hukum sekunder atau yang disebut, adalah data yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perceraian dilengkapi dengan literature, hand out dan pendapat para pakar, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pelaksanaan pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Pengumpulan bahan hukum primer dengan cara menganalisa dan mengolah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 83/Pdt.G/2005/PN.Sda.
- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder dengan cara mengambil dari buku kumpulan perundang-undangan, membaca dan mempelajari buku-buku, karangan yang ditulis oleh para ahli dibidangnya, yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan pengolahan bahan hukum dengan cara menganalisa dan merangkum secara obyektif, lebih banyak, lebih tepat, yang terpusat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.4. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder diolah secara deskriptif analisis dengan menganalisa yang didasarkan atas gambaran dan pemaparan yang senyatanya, hal ini digunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian. Penulisan skripsi dibagi dalam 4 (empat) bab, sebagai awal penulisan merupakan pendahuluan yang ditempatkan pada Bab I, memaparkan latar belakang munculnya permasalahan yang menjadi kajian. Selain itu Bab I menjadi awal dari penulisan skripsi yang menerangkan hal yang paling utama sebagai pemaparan keadaan yang terjadi berisikan hal-hal yang berhubungan dengan perceraian dan hak asuh anak tsb.

Bab II ini membahas tentang permasalahan yang pertama, tentang apa saja tanggung jawab dan sangsi hak asuh anak yang masih *minderjarig* pada orang tua setelah penetapan putusan perceraian.

Bab III Pembahasan terhadap permasalahan yang terakhir karena dalam Bab ini akan membahas tentang Bagaimana penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam Putusan

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda. terkait dari pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan pada pemberian hak asuh anak yang masih *minderjarig*.

Bab terakhir dari penulisan ini adalah Bab IV karena dalam Bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan permasalahan di atas, dan memberikan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, dengan beberapa harapan serta masukan guna mempertegas dari pembahasan permasalahan dalam skripsi.

Pemaparan sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk membantu mempermudah pemahaman pada keseluruhan dari skripsi.